

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN
KAPUAS HULU



DESEMBER 2024

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

PERIODE 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Putussibau, Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU



S. S.SOS., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19671201 198908 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengantujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan PD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) PD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (PD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026.

Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan ;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas ;dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu–isu strategis sebagai berikut :

1. Kondisi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di bidang Perhubungan yang kurang laik,
2. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang masih kurang,
3. Masih kurangnya SDM di bidang Perhubungan,
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan angka menengah daerah serta tata cara perubahan serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031. (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan satu tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024
 2. Menyediakan arah penyusunan penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024
 3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT,PD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar dokumen

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2018

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2024

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan dilaksanakan. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi PD; dan

2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran Strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, memuat capaian beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
Capaian kinerja 100% sasaran 1 terdiri dari 1 indikator sasaran yang memenuhi target kinerja.
2. Sasaran : meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana Perhubungan
Capaian kinerja 100 % sasaran 2 terdiri dari 3 indikator sasaran yang telah memenuhi target kinerja semua.

Adapun rincian capaian indikator sasaran tahun 2024 dituangkan dalam tabel berikut :

| No | Sasaran | indikator | target | realisasi | keterangan |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan | Nilai Evaluasi SAKIP | B | BB | tercapai |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 79 | 75 | tercapai |
| | | % Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik | 79 | 75 | tercapai |
| | | % Angkutan Umum LAIK jalan | 85 | 80 | tercapai |

Data tersebut menunjukkan hasil kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 baik dari kinerja atau dari sumber daya manusia.

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

1. Sasaran startejik

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”

Berikut merupakan penjabaran dari visi diatas tersebut :

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.

2. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk mengwujudkan visi, di perlukan langkah-langkah yang dijabarkan di dalam misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yaitu :

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan | Nilai Evaluasi SAKIP | BB |
| 2. | Meningkatnya keselamatan lalu lintas | Angka kecelakaan Lalu lintas | < 10 |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 85 |
| | | % Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik | 75 |
| | | % Angkutan Umum LAIK jalan | 90 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tataruang.

2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan

3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan
4. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan

B. Program dan Kegiatan

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebanyak 3 Program,Adapun Program-program tersebut sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran program “terselenggaranya penunjang urusan Pemerintah Daerah”

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sasaran program “ terselenggaranya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3) Program Pengelolaan Pelayaran

Sasaran program “terselenggaranya pengelolaan Pelayaran”

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 3 (tiga) Program di atas, maka rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program *“Predikat SAKIP Dishub dari Inkab, Tingkat penilaian realisasi keuangan, Tingkat penilaian realisasi keuangan, Indeks Kepuasan Pelayanan Internal, Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah, Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah, dan Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik* adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen Renstra, Renja, IKU, IKI dan KAK”

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen RKA ”

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen Perubahan RKA-SKPD ”

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen DPA ”

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah dokumen Perubahan DPA ”

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ dan SAKIP ”

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) "laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar Gaji dan tunjangan ASN"

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Pengujian/ verifikasi keuangan"

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan Keuangan Akhir Tahun"

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) "dokumen administrasi barang milik daerah dan Laporan Kegiatan"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) "Laporan sk tim penghapusan BMD, daftar penghapusan BMD, laporan penghapusan BMD"

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) "Dokumen administrasi umum dan Laporan Kegiatan"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan

Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar Kebutuhan pakain dinas beserta atribut kelengkapan"

b. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

Indikator Sub kegiatan (Output) "Daftar kebutuhan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian"

c. Monitoring ,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator Sub kegiatan (Output) “daftar kebutuhan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai”

d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undang”

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) “kegiatan administrasi umum perangkat daerah”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor”

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor”

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Laporan kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Dokumen Pengadaan peralatan dan mesin lainnya”

b. Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya

Indikator Sub kegiatan (Output) “Dokumen Pengadaan peralatan dan mesin lainnya”

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar penggunaan jasa surat menyurat”

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar penggunaan telepon dan internet,daftar penggunaan Air ledeng dan daftar penggunaan daya listrik”

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen Pemeliharaan dan Laporan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan Laporan pemeliharaan kendaraan dinas”

- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya”

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program "*Porsentase tersedianya Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)*" adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) "terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan (Output) "terlaksananya dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota "

2) Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) "terlaksananya kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan (Output) "jumlah fasilitas prasarana jalan(rambu-rambu lalu lintas) yang disedia"

b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota

Indikator Sub kegiatan (Output) "jumlah fasilitas perlengkapan Jalan di jalan (PJU) yang terpasang"

c. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Indikator Sub kegiatan (Output)" jumlah fasilitas perlengkapan Jalan di jalan (PJU) yang terpelihara"

3) Kegiatan Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator kegiatan (Output) "terlaksananya kegiatan Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir"

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah kegiatan pengawasan dan penertiban perparkir

4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah unit sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia”

b. Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor

Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah kendaraan bermotor wajib uji”

C. Program Pengelolaan Pelayaran

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*persentase tersedian Fasilitas ASDP*” adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah lokasi kegiatan koordinasi dan dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan ASDP”

2) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Penerbitan

Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah lokasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek di Kabupaten Kapuas Hulu”

- 3) Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah tambatan Perahu yang dibangun”

- b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah Dermaga yang dipelihara”

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

| de | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 4 Dokumen | 1.408.000 | DAU | | 4 Dokumen | 2.500.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 4 Dokumen | 1.518.000 | DAU | | 4 Dokumen | 2.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----|--|-----------|-----------|
| | | Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 3 Dokumen | 2.393.000 | DAU | | 3 Dokumen | 2.500.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 4 Dokumen | 3.102.000 | DAU | | 4 Dokumen | 3.500.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 4 Dokumen | 1.528.000 | DAU | | 4 Dokumen | 2.500.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----|---|-----------|------------|
| Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu | 3 Dokumen | 72.233.000 | DAU | | 3 Dokumen | 50.000.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 4 Paket | 26.416.000 | DAU | | 4 Paket | 25.000.000 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | - | 4.824.000 | - | - | - | 5.824.000 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|--|-----------|-------------|
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 100 % | 27.700.000 | DAU | | 100 % | 25.000.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 1 Dokumen | 9.600.000 | DAU | | 1 Dokumen | 5.000.000 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 100 % | 5.560.000 | DAU | | 100 % | 5.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu | 1 Tahun | 727.400.000 | DAU | | 1 Tahun | 230.456.000 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 1 Dokumen | 37.722.000 | DAU | | 1 Dokumen | 21.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|--|-----------|-------------|--|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 1 Unit | - | DAU / Pokir | | 1 Unit | 600.000.000 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 3 Unit | - | DAU | | 3 Unit | 35.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 1 Laporan | 5.000.000 | DAU | | 1 Laporan | 6.000.000 | |
| Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 1 Laporan | 85..435.560 | DAU | | 1 Laporan | 93.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|--|-----------|-------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 1 Laporan | 960.543.080 | DAU | | 1 Laporan | 715.000.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 7 Unit | 781.135.000 | DAU | | 7 Unit | 235.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 15 Unit | 21.150.000 | DAU | | 15 Unit | 10.000.000 |
| | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Kabupaten Kapuas Hulu, Kec. Putussibau Utara | 6 Unit | 30.000.000 | DAU | | 6 Unit | 75.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----|---|-----------|-------------|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 2 Unit | - | DAU | | 2 Unit | 200.000.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | |
| Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu | 1 Dokumen | 94.111.000 | - | - | 1 Dokumen | 95.000.000 |

| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|--|----------|-------------|
| Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | Kabupaten Kapuas Hulu, Kec. Puring Kencana, Merakai Panjang | 4 unit | - | DAU / Pokir | | 4 unit | 400.000 |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Pala Pulau, Kec. Semitau, Kec. Seberuang, Kec. Silat Hilir, Bongko | 9 unit | 5.348.123.000 | DAU / Pokir | | 8 Lokasi | 180.925.000 |
| | | | | | | | | |

| Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--|--|-----------|------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Kapuas Hulu,Putussi bau Utara,Putus sibau Kota | 4 laporan | 97.040.000 | | | 4 laporan | 60.655.250 |
| | | | | | | | | |

| Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---|-----------|-------------|
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Kabupaten Kapuas Hulu,Putussibau Utara | 1 unit | - | DAU / Pokir | | 1 Paket | 100.000.000 |
| Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Dishub Kabupaten Kapuas Hulu | 1 dokumen | 106.882.000 | DAU | - | 1 dokumen | 106.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|--|-----------|-------------|
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk | Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu | 1 laporan | 277.120.000 | DAU | | 1 laporan | 500.000.000 |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu | 1 unit | 350.000.000 | DAU / Pokir | | 1 unit | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|-------------|
| Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Kapuas Hulu, Kec. Puntubau Kota, Kec. Puntubau Utara, Kec. Puring Kencana, Kec. Jongkong, Kec. Suhaid, Kec. Selimbau | 1 Laporan | - | DAU / DAK | | 1 Laporan | 232.911.864 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----|--|--|-----------|------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | | | | |
| Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu | 4 Laporan | 104.750.000 | DAU | | | 4 Laporan | 32.173.850 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----|--|-----------|------------|
| Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang | Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu | 4 Laporan | 113.060.000 | DAU | | 4 Laporan | 36.067.600 |

| Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|--|-----------|-------------|
| Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah | Kabupaten Kapuas Hulu, Kec.Putussi bau Kota,Kec.Na nga Embaloh,Ke c.Jongkong, Kec.Suhaid | 9 Laporan | - | DAU | | 9 Laporan | 505.706.000 |

| Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|--|---------|---------------|
| Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun | Kabupaten Kapuas Hulu,Kec.Bunut Hilir Desa Empangau Hulu,Desa Siawan,Kec. Jongkong,D | 12 Unit | 1.100.000.000 | DAU / Pokir | | 12 Unit | 1.344.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Jongkong Pasar,Dusun Tanjung Ce esa rmin ,Kec.Putussi bau selatan Desa Kedamin Darat,Kec.S elimbau Desa Nibung,Kec. Embaloh Hulu Desa Sadap,Kec.P utussibau Utara Desa Sambus,Des a Tanjung Beruang,Kec .Bunut Hilir Desa Empangau Hulu, Kec.Embalo h Hilir Desa Nanga Embaloh,Ke c.Embaloh Hulu Desa | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----|--|-----------|-----------------------|
| Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Sungai,danau dan penyebrangan | Jumlah Laporan pengawasan pengoprasian Pelabuhan Sungai,danau dan penyebrangan | Kab. Kapuas hulu , | 4 laporan | 59.535.000 | DAU | | 4 laporan | 50.000.000 |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | 13.192.074.793 | | | | 13.962.737.036 |

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu perlu disusun untuk menetapkan target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran untuk tahun 2024. Sekian dan terima kasih.

Putussibau, Desember 2024



ERLI, S.SOS., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671201 198908 1 004